

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Niebuhr, Jose Porfirio Miranda*, Nusamedia, Bandung, 2015.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.

- Muhammad Syahrums, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Suryanto, dkk, *Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif dalam Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Wisnubroto, *Al. Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

**Jurnal:**

- Abdurrahim, La Ode Husen, Nur Fadhillah Mappaselleng, “Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar”, *Jurnal of Lex Generalis*, Edisi No. 1 Vol. 1, Juni 2020.
- Ade Mahmud, “Dinamika Disparitas Pidana Uang Pengganti Dengan Pidana Subsider Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Pamulang Law Review*, Edisi No.1 Vol.6, Agustus 2023.
- Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *JURIS*, Edisi No. 1 Vol. 9, Juni 2010.

- Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 1 Vol.10, 2022.
- Aryandi, Mahmud Mulyadi, Syarifah Lisa Andriati, “Penerapan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan”, *Jurnal Rectum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Januari 2025.
- Diah Pudjiastuti, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 5, Juli 2023.
- Dwina Putri, “Korupsi dan Perilaku Koruptif”, *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Edisi No. 2 Vol. 5, Juli-Desember 2021.
- Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No.1 Vol. 31, 2019.
- Erman Syafrudianto, Madiasa Ablizar, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi, “Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)”, *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Juni 2021.
- Erry Gusman, Kedudukan BPKP Dalam Mengaudit Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, *Ensiklopedia Social Review*, Edisi No. 3 Vol. 1, Oktober 2019.
- Fariaman Laia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Dalam Jabatan”, *Jurnal Panah Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 1, Agustus 2022.
- H. Muslihin Rais, “Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 6, Juni 2017.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Edisi No. 1 Vol. 13, Januari 2019.

- Hendra Gunawan, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam, *Yurisprudentia*, Edisi No. 2 Volume. 4, Desember 2018.
- Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*’, No.1 Vol. 5, Mei 2011.
- La Gurusi, Safrin Salam, “Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 2 Vol. 7, Desember 2023.
- Lia Hartika, Indri Dhitisari, Syarifah Lisa Andriati, “Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Binamulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 11, Desember 2022.
- Lola Yustrisia, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Edisi No. 75 Vol. 11, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, April 2017.
- Mohamad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, Attie Olli, “Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional”, *Lex Crimen*, Edisi No. 5 Vol. 10, April 2021.
- Muammar, Maulana Meldandy, “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Widya Pranata Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 4, Februari 2022.
- Nasrah Hasmiati Attas, “Eksekusi Uang Pengganti Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Delik Adpertisi*, Edisi No. 1 Vol. 2, Januari 2023.
- Natalina Nilmsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, Edisi No. 2 Vol. 13, Juni 2014.
- RB Budi Prastowo, “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Edisi No. 3 Vol. 24, Juli 2006

- Rozidateno Putri Hanida, bimbi irawan, fachrur Rozi, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal”, *Jurnal Antikorupsi*, Edisi No. 6 Vol. 2, Juni 2021.
- Sabirin, “Pemecahan Berkas Perkara Dan Relevansinya Dengan Asas Peradilan Cepat Dalam Perspektif Keadilan”, *Al’ Adl Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 13, Juli 2021.
- Saidah, “Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad Dan Matan Hadis)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No.1 Vol. 13, Januari 2015.
- Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)”, *Jurnal Media Informatika*, Edisi No. 1 Vol.7, Januari 2025.
- Sutrisno, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Law Review*, Edisi No.2 Vol. 3, Oktober 2020.
- Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 18, Januari 2010.
- Vivi Ariyanti, “Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 4, Desember 2019.

**Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus/2022/Pn

Sby

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid.Sus/2022/Pn

Smg

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:82/Pid.Sus/2022/Pn

Mks

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2023/Pn

Smg

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:59/Pid.Sus/2023/Pn

Mks

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 73/Pid.Sus/2023/Pn

Sby

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pn

Mks

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus/2023/Pn

Mdn

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus/2024/Pn

Yyk

Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.Sus/2024/Pn

Mdn



**Data Elektronik:**

Resa IS, *Perbedaan Penggelapan dan Pencurian di KUHP*, terdapat dalam <https://www.ilslawfirm.co.id/perbedaan-penggelapan-dan-pencurian-di-kuhp/>. Diakses tanggal 16 April 2025 pada pukul 15.27 WIB.

Jaksa Agung Ungkap 10 Sektor Rawan Korupsi, Ini Daftarnya, terdapat dalam <https://story.kejaksaan.go.id/agenda-pimpinan/jaksa-agung-ungkap-10-sektor-rawan-korupsi-ini-daftarnya-89449-mvk.html?screen=4> diakses pada 17 April 2025 pada pukul 20.07 WIB.

